



Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan

Nurmalasyiah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, Kalimantan Selatan, Indonesia

nurmalasyiah2@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus, informan yang digunakan adalah informan kunci, utama dan pendukung, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder, serta analisis data dengan cara kualitatif menggunakan teori Miles and Huberman (1992;16), yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dan pembahasan penelitiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan, yang mana sebelum adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar, Kabupaten Tabalong untuk IPM nya masih berada pada urutan ke-9 dan ke-10 se Kalimantan Selatan, namun setelah adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar ini Kabupaten Tabalong masuk dalam urutan ke-3 se Kalimantan Selatan. 3) Model Kebijakan Gerbang Emas Bersinar di Kabupaten Tabalong, adalah model Bottom-up, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan bahwa model Bottom-up yang dilaksanakan selama ini tidak murni seperti yang diharapkan oleh masyarakat, karena keterlibatan Pemerintah masih sangat dominan baik itu dari inisiasinya maupun fasilitatornya.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Gerbang Emas Bersinar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Abstract

The purpose of this study is to find out and describe the Golden Gate Policy in Increasing the Human Development Index (HDI) in Tabalong Regency, South Kalimantan. The methods used in this study are qualitative research methods with case studies, the informants used are key, main and supporting informants, data collection by observation, interviews and documentation, with primary and secondary data sources, and data analysis in a qualitative way using Miles and Huberman's theory (1992; 16), namely data reduction, data presentation, conclusion drawn/verification. The results and discussion of the research are that the Human Development Index (HDI) in Tabalong Regency has increased, which before the Golden Gate Policy Shines, Tabalong Regency for HDI is still in 9th and 10th place in South Kalimantan, but after the Golden Gate Policy Tabalong Regency is in 3rd place in South Kalimantan. 3) The Golden Gate Policy Model in Tabalong Regency, is a Bottom-up model, but the results of the study show that the community really expects that the Bottom-up model that has been implemented so far is not as pure as expected by the community, because the Government's involvement is still very dominant, both from its initiation and its facilitators.

Keywords: Public Policy, Golden Gate Shines, Human Development Index (HDI)

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan dalam abad 21, telah dipengaruhi oleh ideologi Globalisasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemahaman Globalisasi kontemporer yang bertumpu pada 3 pilar pembangunan bidang ekonomi (*deregulasi, privatisasi* dan stabilitas keuangan) terasa sangat penting, mendesak dan relevan untuk memotivasi setiap negara untuk dapat menemukan model pembangunan yang cocok dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat global di satu sisi, namun di sisi lain pengaruh pemahaman tersebut tidak boleh meninggalkan atau bahkan menghapuskan sama sekali nilai-nilai lokal yang memberikan pengaruh signifikan bagi pembangunan saat ini (Kholik, 2020).

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan *kompleks* dan *multidimensional* yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada kenyataannya, persoalan kemiskinan belum dapat diatasi sepenuhnya, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi (Choiriyah, 2018).

Sejalan dengan pandangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional. Pemerintah harus menghantarkan masyarakat Indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan lahir dan bathin, serta harus mengatasi masalah jangka panjang seperti masalah pertumbuhan ekonomi (Syakhfiani, 2020).

Sedangkan di dalam jangka pendek Pemerintah dituntut untuk selalu dapat membantu menciptakan lingkungan iklim usaha yang kondusif atau dukungan semua pihak, seiring dengan penentasan masalah-masalah ekonomi jangka pendek. Keberhasilan program jangka pendek dirasa penting, mengingat keberhasilan pemerintah tidak lepas dari kemampuannya menangani masalah-masalah ekonomi jangka pendek (Kennedy, 2019).

Kondisi tersebut memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk berbagai kebijakan yang memberikan benefit terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Setiap daerah memiliki metode masing-masing dalam bentuk kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tercapainya kondisi *sustainable* antara kebijakan dari Pemerintah dan masyarakat sebagai penerima dampak, yang diharapkan dapat menjadikan kebijakan tersebut berhasil. Hal tersebut sejalan dengan yang terjadi di Kabupaten Tabalong dalam bentuk gerakan dan kebijakan dalam percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satunya melalui gerakan Gerbang Emas Bersinar yang menjadi Gerakan dan Kebijakan percepatan peningkatan IPM.

Menurut hasil penelitian bahwa PDB dan PPN secara signifikan mempengaruhi IPM. Hasil estimasi model ECM menunjukkan bahwa PDB, PPN, dan krisis ekonomi tahun 2008 mempengaruhi IPM, meskipun PPN hanya mempengaruhi dengan tingkat signifikansi 10%. Seperti diharapkan, PDB berpengaruh positif terhadap IPM, karena peningkatan PDB akan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Seperti diharapkan juga, PPN berpengaruh negatif terhadap IPM karena kenaikan pajak pemerintah mengurangi *disposable income*, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. DD tidak berpengaruh secara positif terhadap IPM yang berarti bahwa desentralisasi pemerintahan belum mampu diterjemahkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiawan, 2013).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Gunung Cupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis melalui penyuluhan mengenai arti penting pendidikan untuk meningkatkan IPM adalah antusiasme masyarakat yang meningkat mendengarkan paparan dan bertambahnya pemahaman tentang arti pendidikan bagi kehidupan mereka (Wijayanti, 2020).

Meningkatkan IPM di Jawa Barat, perlu menciptakan sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta menciptakan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah yang melibatkan peranan Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat. Setiap kenaikan pendapatan zakat sebagai sumber PAD sebesar 1 persen juga akan menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 1,14. persen, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Oleh

karena itu zakat sebagai sumber PAD memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di 12 kabupaten/kota Provinsi Aceh, namun zakat yang produktif akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak kepada IPM dari pada zakat konsumtif (Varlitya, 2017).

Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, harus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud, yaitu adanya kepaduan antara satu dengan yang lain, baik dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan, dalam memberdayakan kelompok masyarakat Jawa Barat. Program-program yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, harus difokuskan pada keluarga miskin pada wilayah daerah tertentu. 2. Keterbatasan pemerintah daerah dalam pendanaan pembangunan yang berkaitan pencapaian target IPM ini, maka peranan BAZ dan LAZ dapat membantu dalam upaya peningkatan IPM dengan program kemitraan dan bina lingkungan (Sutjipto, 2006).

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pendidikan melalui pemberdayaan masyarakat, menciptakan sinergi antar berbagai elemen. Sehingga perbedaan dari penelitian yang sudah ada dengan penelitian ini, bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong adalah dengan melakukan Koordinasi, Sinergi, Sinkronisasi dan Integrasi antar Pemerintah, Privat Sektor dan Masyarakat. inilah *novelty* atau kebaruannya.

IPM Kabupaten Tabalong pada tahun 2015 dengan angka 69,35 berhasil naik ke peringkat tiga dari sebelumnya di posisi kesembilan se- Provinsi Kalsel. Angka harapan hidup masyarakat Tabalong pun meningkat menjadi 69,74 dengan pendapatan ril perkapita Rp10,171 juta. (<https://portal.tabalongkab.go.id,2017>).

Gerbang Emas Bersinar tersebut muncul karena adanya *political will* dari Kepala Daerah Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk melalui regulasi kebijakan antara lain :

1. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera Bersinar di Kabupaten Tabalong.
2. Peraturan Bupati Tabalong tentang Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Secara filosofis, gerakan tersebut didasari pada buruknya nilai IPM Kabupaten Tabalong yang tidak sejalan dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Sebuah fenomena ironis yang dikenal dengan teori "kutukan sumber daya alam" (*the resource curse/the paradox of plenty*) yang menyatakan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama yang tidak terbarukan seperti minyak dan hasil tambang, cenderung lebih lambat pertumbuhan ekonominya jika seperti minyak dengan negara yang terbatas sumber daya alamnya menjadi salah satu landasan mengapa Gerakan tersebut lahir. Kondisi demikian dirasa oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah tidak memberikan pengaruh terhadap kondisi kualitas IPM yang baik. (<https://eprints2.ipdn.ac.id,2020>).

Kabupaten Tabalong untuk peringkat IPM diantara 13 Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2004 menempati posisi peringkat ke-10 dan di tahun 2005 sampai tahun 2013 bervariasi antara peringkat 7,8 9 dan 10. Dengan demikian Posisi IPM tersebut dirasa belum dapat dikategorikan baik oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, kondisi ini juga dilihat dari tabel tersebut IPM menunjukkan 9 tahun kembali pada peringkat ke-10. Kondisi tersebut diamati dan menjadi dasar dorongan untuk membentuk suatu strategi dalam peningkatan IPM dalam rangka memajukan kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk dapat bersinergi antara keinginan dan Program Pemerintah Pusat melalui Gerbang Emas Bersinar. Program tersebut menjadi diimplementasikan secara komprehensif dan terpadu untuk melaksanakan pembangunan desas secara sinergis dengan memberdayakan semua stakeholder dan seluruh sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian pedesaan. (BPS Kalsel <https://kalsel.bps.go.id,2005>)

Dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahannya adalah tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong dikategorikan rendah, sehingga dapatlah dirumuskan permasalahannya yaitu, Bagaimanakah *Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong ?*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melihat dan mendeskripsikan pelaksanaan Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Juga sumber data sekunder melalui studi kepustakaan (meliputi buku, jurnal, dokumen, majalah, berita dan sumber-sumber yang memiliki relevansi lainnya). Teknik penentuan informan berdasarkan tujuan dan permasalahan penelitian. Adapun informan yang dimaksud yaitu SKPD, dan Aparat Desa yang ada di Kabupaten Tabalong. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data di analisis menggunakan metode dari Miles and Huberman (1992), yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data tersebut, yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Moleong, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bupati Anang menilai pertumbuhan ekonomi di Tabalong dapat menjadikan tabalong sebagai kabupaten yang tumbuh dan berkembang secara mandiri. Meski sempat anjlok minus 2,50 persen di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun berkat dukungan berbagai elemen ekonomi Tabalong berhasil bangkit menjadi 3,27 persen di tahun 2021 dan di tahun 2022 tembus 5,30 persen. Hal ini membuktikan, bahwa pertumbuhan ekonomi Tabalong berjalan dengan baik seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan ekonomi Kabupaten tabalong terus dilakukan oleh Pemkab tabalong, salah satunya dengan menyiapkan Tabalong sebagai penyangga ibu kota Nusantara di sektor pertanian. Selain pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Tabalong juga terus meningkat setiap tahun. Di tahun 2020, IPM Tabalong berada di angka 72,19, di tahun 2021 meningkat menjadi 72,60 dan di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 73,13. Angka IPM ini pun membuat Kabupaten Tabalong menjadi peringkat pertama IPM tertinggi di tingkat Kabupaten seluruh Kalimantan Selatan dan peringkat 3 tertinggi di tingkat Kabupaten Kota seluruh Kalimantan Selatan, dibawah Kota Banjarmasin dan Banjar Baru. (Portal Tabalong, <https://portal.tabalongkab.go.id> 2023).

Tabel.2.

Angka Harapan Hidup 2021-2023 Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong	Angka Harapan Hidup (Tahun)		
	2021	2022	2023
	70,57	70,84	71,28

Sumber : BPS Kabupaten Tabalong 2023

Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Angka harapan Hidup Kabupaten Tabalong dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan.

Tabel 3.

Harapan Lama Sekolah Tahun 2021-2023 Kabupaten Tabalong

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Tabalong	12,89	12,90	12,91
Kalimantan Selatan	12,81	12,82	12,86

Sumber : BPS Kabupaten Tabalong 2023

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Kabupaten tabalong mengalami peningkatan ini terlihat pada tahun 2021 sebesar 12,89%, tahun 2022 sebesar 12,00% dan tahun 2023 sebesar 12,91% dibandingkan dengan Kalimantan Selatan secara keseluruhan, kabupaten tabalong berada diatas jumlah persentasenya.

Tabel 4.
Angka Melek Huruf Kabupaten Tabalong Tahun 2018,2022, 2023.

Kabupaten Tabalong	Angka Melek Huruf (Persen)		
	2018	2022	2023
	99,39	98,87	98,79

Tahun 2017 menggunakan Angka Melek Huruf Latin

Sumber : BPS Kabupaten Tabalong 2023.

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 Tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Kabupaten tabalong mengalami peningkatan dari 99,39 % di tahun 2018, tahun 2022 sebesar 98,87% dan ditahun 2023 sebesar 98,79%.

Tabel 5.
Pengeluaran Riil per Kapita Kabupaten Tabalong 2013 dan 2021

Kabupaten Tabalong	Tahun	
	2013	2021
	9,918	11.470

Sumber : BPS Kabupaten tabalong 2022

Dari tabel diatas dapat dipahami, bahwa pengeluaran riil per Kapita kabupaten tabalong mengalami peningkatan yang dilihat dari tahun 2013, sebesar 9,918% dan tahun 2021, sebesar 11,470%.

Tabel 6.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Dimensi Pembangunan diKabupaten Tabalong, 2018-2020.

Tahun	Usia harapan hidup	Harapan lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	Pengeluaran per kapita (ribuRp)
2018	70,12	12,53	8,57	11.227
2019	70,33	12,59	8,78	11,476
2020	70,44	12,72	9,10	11,283

Sumber : BPS, Survei Social Ekonomi Nasional

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Indek Pembangunan Manusia sangat berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi, khususnya di Kabupaten Tabalong. Dan hal ini sesuai dengan definisi dari IPM itu sendiri, pengertian indeks pembangunan manusia (IPM) sendiri sebagaimana yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) yaitu “merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) didapatkan dari hasil pengukuran perbandingan angka harapan hidup, angka melek huruf yang dilihat dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dan kemampuan daya beli masyarakat untuk semua negara seluruh dunia. Tingkat indeks pembangunan manusia yang tinggi, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kemampuan masyarakat untuk dapat berkontribusi lebih banyak dalam meningkatkan produktivitas dan kreatifitas mereka. Pengertian indeks pembangunan manusia diklasifikasikan oleh lembaga UNDP (United Nation Development Program) sebagai “Suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk”. Dengan demikian, IPM

merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. United Nations Development Programm (UNDP) telah menerbitkan laporan pembangunan sumber daya insani dalam satuan kuantitatif yang disebut dengan Human Development Indeks (HDI). Komponen indeks pembangunan manusia (IPM) sendiri disusun dari tiga komponen (BPS : 2014) yakni "Lamanya hidup, yang diukur dari harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, yang didapat dengan memadukan antara angka melek huruf pada usia dewasa dengan bobot 2/3 dan rata-rata lamanya bersekolah yang ditempuh dengan bobot 1/3 dan tingkat kehidupan yang layak,

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabalong ini, juga didasarkan dari adanya Koordinasi, Sinkronisasi, Sinergi dan Integrasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait langsung dengan Kebijakan Gerbang Emas Bersinar.

Koordinasi yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa Koordinasi sudah dijalankan dengan baik, ini terlihat dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara yang ada dalam Kebijakan Gerbang Emas Bersinar yang ditetapkan dalam Perbub No.18 Tahun 2015, yang mana tim tersebut adalah Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten, Tim Sekretariat di Tingkat Kabupaten, Kelompok Kerja / Pokja di tingkat Kecamatan. Koordinasi juga didukung dengan adanya partisipasi dari semua pihak yang terkait dalam Gerbang Emas Bersinar dan juga adanya sosialisasi yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara Gerbang Emas Bersinar tersebut. Sosialisasi yang diharapkan adalah tidak hanya pada saat program Gerbang Emas akan diluncurkan, tetapi juga sosialisasi pada saat program berjalan, atau dilakukan secara kontinyu agar masyarakat bisa memahami keinginan dari adanya program tersebut. Dengan demikian, maka Koordinasi yang telah dilakukan selama ini oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Tim Sekretariat di Tingkat Kabupaten, Kelompok Kerja di Tingkat Kecamatan, pihak Swasta, sampai ke tingkat Desa, sudah berjalan dengan semestinya dan berjalan dengan baik..

Sinergi yang dilakukan dalam Kebijakan Gerbang Emas Bersinar di Kabupaten Tabalong tersebut sudah berjalan dengan baik, karena sudah dilakukan usaha dan kerjasama, baik dari pemerintah daerah yakni disini Bappeda selaku Leading Sektor, juga dengan SKPD-SKPD, serta Tim Pokja Kecamatan dan aparat Desa tentang Kebijakan Gerbang Emas Bersinar tersebut, namun sinergi disini masih ada sedikit kendala yaitu terkadang adanya miss komunikasi yang terjadi antara aparat Desa dengan masyarakat, sehingga terjadi perbedaan persepsi mengenai anggaran yang diberikan oleh Kebijakan Gerbang Emas Bersinar tersebut. Menurut masyarakat bahwa anggaran yang diberikan oleh Kebijakan Gerbang Emas Bersinar ini sangat banyak, sehingga masyarakat maunya semua keinginan mereka dikabulkan, sedangkan menurut aparat Desa bahwa anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan apa yang direncanakan dan dikehendaki oleh pihak pemerintah daerah. Sehingga disini pihak aparat Desa harus mampu memberikan penjelasan dengan baik dan benar, sehingga masyarakat dapat memahaminya

Sinkronisasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Kinerja Kebijakan Gerbang Emas Bersinar di Kabupaten Tabalong tersebut, maka dapat menunjukkan bahwa Kinerja dari Kebijakan Gerbang Emas Bersinar ini sudah bisa dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari adanya kesamaan tujuan kegiatan program Gerbang Emas Bersinar dengan kegiatan yang ada baik itu dari tingkat Kabupaten, SKPD yang terkait juga dengan pihak swasta atau perusahaan (CSR) yang ada di Kabupaten Tabalong serta juga kegiatan program yang dikehendaki oleh masyarakat. Baik dari perencanaan dan penganggarannya tidak terjadi tumpang tindih atau oper laving kegiatan program, namun disini dilaksanakan seirama dengan pihak dan dinas yang terkait. Sehingga dengan adanya sinkronisasi kegiatan program Gerbang Emas Bersinar ini, maka pelaksanaan pembangunan yang ada di desa-desa dapat berjalan dengan baik, dan akhirnya pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Integrasi sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan semua kegiatan program yang berkaitan dengan Kebijakan Gerbang Emas Bersinar di Kabupaten Tabalong. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa Integrasi harus bisa dijalankan dengan baik dan benar oleh semua Tim yang terkait atau yang berhubungan dengan kegiatan program Gerbang Emas Bersinar tersebut.

Dari Koordinasi, sinergi, sinkronisasi dan integrasi antar SKPD, Aparat Desa, Pihak Swasta dan masyarakat, dan juga Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah Tahun, Angka Melek Huruf, Pengeluaran Riil per Kapita, maka Kebijakan Gerbang Emas Bersinar sudah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tersebut dalam pelaksanaan Kebijakan Gerbang Emas Bersinar. Dengan demikian maka untuk peringkat IPM Kabupaten Tabalongada pada urutan ke tiga (3) se Kalimantan Selatan, dari sebelum adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar, Kabupaten Tabalong selalu berada di urutan sembilan (9) dan urutan ke sepuluh (10).

Sehingga disimpulkan bahwa untuk Kebijakan Gerbang Emas Bersinar di Kabupaten Tabalong



sudah dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusiannya (IPM) sudah mengalami peningkatan dari sebelum adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar IPM Kabupaten tabalong berada di urutan ke-10 dari 13 kabupaten Kota Yang ada Di Kalimantan Selatan, setelah adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar yang telah berjalan selama kurun waktu 10 tahun dari 2015 hingga 2023, IPM Kabupaten Tabalong berada pada urutan ke 3 Kabupaten Kota yang ada Di Kalimantan Selatan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Kebijakan Gerbang Emas Bersinar di Kabupaten Tabalong sudah dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusiannya (IPM) sudah mengalami peningkatan dari sebelum adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar IPM Kabupaten tabalong berada di urutan ke-10 dari 13 kabupaten Kota Yang ada Di Kalimantan Selatan, setelah adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar yang telah berjalan selama kurun waktu 10 tahun dari 2015 hingga 2023, IPM Kabupaten Tabalong berada pada urutan ke 3 Kabupaten Kota yang ada Di Kalimantan Selatan.

SARAN

1. Kebijakan Gerbang Emas Bersinar harus tetap dilanjutkan walaupun pergantian Kepemimpinan Daerah dengan berakhirnya Kepemimpinan Bupati Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan keberlanjutan setiap program kegiatan yang telah dijalankan masyarakat.
3. Koordinasi, Sinergi, Sinkronisasi dan Integrasi antar SKPD, Masyarakat dan Swasta terus dijalankan agar IPM Kabupaten Tabalong lebih meningkat lagi.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
2. Bappeda Kabupaten Tabalong
3. Kepala Kantor SKPD Tabalong
4. Aparat Desa Kabupaten Tabalong
5. Masyarakat Kabupaten Tabalong.

DAFTAR PUSTAKA

- Cendanawangi, E. , H. S. , & A. M. . (2020). Pengaruh remitansi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 1987-2017. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(2), 74–87.
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi kebijakan publik dalam penanganan kemiskinan; Studi implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah.*, 3(2), 17–30.
- Dunggio, T. , & D. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo. . *Journal of Economics, Business and Administration (JEBA) — E-ISSN: 2746-1688* , 1(1), 13–26.
- Kennedy, P. S. J. (2019). *Modul Ekonomi Pembangunan Permasalahan Jangka Pendek Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia.
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56–70.
- Moleong, L. J. , & E. P. R. R. B. (2004). *Metodelogi penelitian*. (01 ed., Vol. 3). Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*. Tahta Media.
- Royat, S. (2015). Kebijakan Pemerintah dalam. Penanggulangan Kemiskinan. *Jakarta: Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengangulan Kemiskinan*.



- Setiawan, M. B. , & H. A. (2013). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26.
- Subianto, A. (2020). *Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. (1st ed.). Brilliant1.
- Sutjipto, H. J. S. D. P. 22(4), 479-495. (2006). Sinergitas Pembangunan Daerah dalam Meningkatkan IPM di Jawa Barat. . *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 22(4), 479–495.
- Syakhfiani, A. , L. S. , E. K. , & S. M. (2020). Implementasi Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam mengukur Ipm Di Kabupaten Tabalong. Implementasi Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Mengukur Ipm Di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Papatung*, 3(1), 242–255.
- Varlitya, C. R. (2017). Analisis Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Pendekatan Data Panel (Studi Kasus 12 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 192–211.
- Wijayanti, Y. , P. S. , & K. Y. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Melalui Penyuluhan Tentang Arti Penting Pendidikan Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. . *Abdimas Galuh*, , 2(1), 34–43.
- Winarno, B. (2013). *Etika pembangunan*. . Media Pressindo.

<https://portal.tabalongkab.go.id>
<https://www.dpr.go.id> , 2014
<https://kalsel.bps.go.id,200>
<https://portal.tabalongkab.go.id,2017>
<https://eprints2.ipdn.ac.id,2020>
<https://kalsel.bps.go.id,2005>